

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
PRAKATA PENULIS	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii

BAB I

PENDAHULUAN	1
-------------	---

BAB II

LOKAL GOVERNMENT DAN OTONOMI DAERAH	9
A. Konsep Local Government	10
B. Makna dan Konsep Desentralisasi	15
C. Desentralisasi Asimetris	21
D. Pemerintahan Daerah di Indonesia	25

BAB III

DAERAH OTONOM KEPULAUAN	38
A. Gagasan Pembentukan Daerah OtonomKepulauan	39
B. Tafsir Provinsi Berciri Kepulauan	43

BAB IV

MALUKU UTARA SEBAGAI DAERAH OTONOM KEPULAUAN	49
A. Potret Maluku Utara Sebagai Daerah Otonom Kepulauan	50
B. Karakteristik Sosial Ekonomi MasyarakatMaluku Utara	56
C. Identitas dan KeragamanBudaya	59
D. KeragamanBahasa Masyarakat Maluku Utara	63

BAB V

DILEMA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI DAERAH KEPULAUAN	70
A. Problema Daerah Berciri Kepulauan	71
B. Kapasitas Fiskal di Daerah Berciri Kepulauan	73
C. Kapasitas Administrasi Pemerintahan di Daerah kepulauan	80

BAB VI

LAYANAN PUBLIK DI DAERAH BERCIRI KEPULAUAN	85
A. Catchment Area di Daerah Berciri Kepulauan	86
B. Layanan Kesehatan di Daerah kepulauan	90
C. Layanan Pendidikan di daerah kepulauan	97
D. Layanan Transportasi Antar Pulau	101
E. Layanan Sampah Laut	107
F. Layanan Air Bersih di Daerah Kepulauan	112

BAB VII

KONFLIK KEWENANGAN PENGELOLAAN LAUT DAN PULAU	116
A. Kebijakan Pengelolaan Laut dan Pulau	117
B. Konflik Pengelolaan Laut dan Pulau	120
C. Tumpang Tindih Regulasi	122
D. Perbedaan Kepentingan Antara Pusat dan Daerah	123

BAB VIII

E-GOVERNMENT SUATU ALTERNATIF LAYANAN PUBLIKDI DAERAH KEPULAUAN	127
A. Pengembangan E-Government di daerah Kepulauan	128
B. Permasalahan E-Government di Daerah Kepulauan	132
C. Smart City: Role Model E-Government di Daerah Kepulauan	134

BAB IX

PENUTUP	140
UNGKAPAN PENGHARGAAN	145
DAFTAR PUSTAKA	146
GLOSARIUM/DAFTAR ISTILAH	155
INDEKS	158
BIOGRAFI PENULIS	160